

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis relevansi penerapan prinsip *Good Governance* terhadap kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Pemerintah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengintegrasikan ormas keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam, sebagai bentuk inovasi pemerintah dalam memperluas partisipasi masyarakat, khususnya lembaga keagamaan, dalam kegiatan ekonomi strategis. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan hukum, sosial, dan lingkungan terkait legitimasi, kapasitas teknis, dan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tata cara pemberian IUP di Indonesia. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang tidak hanya menggambarkan prosedur pemberian izin tetapi juga mengevaluasi penerapannya berdasarkan regulasi yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sementara analisis data menggunakan metode kualitatif dengan tahapan reduksi dan penyajian data.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan urgensi dan pertimbangan Pemerintah dalam memberikan IUP kepada ormas keagamaan adalah bahwa pemberian IUP kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 merupakan langkah strategis Pemerintah untuk mengintegrasikan kelompok sosial keagamaan ke dalam kegiatan ekonomi nasional, khususnya sektor pertambangan. Hasil penelitian yang berkaitan dengan *good governance* menunjukkan bahwa penerapan *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sangat krusial dalam memastikan keberlanjutan serta efektivitas kebijakan ini. Pengawasan dan regulasi yang kuat diperlukan agar proses perizinan berjalan secara adil, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat berkontribusi secara positif bagi pembangunan nasional.

Kata Kunci: *Good Governance*, Izin Usaha Pertambangan, Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.

ABSTRACT

This study analyzes the relevance of applying Good Governance principles to the policy of granting Mining Business Permits (IUP) to religious community organizations based on Government Regulation No. 25 of 2024. The government aims to enhance public welfare by integrating religious organizations into natural resource management as an innovative approach to expanding community participation, particularly religious institutions, in strategic economic activities. However, this policy has sparked legal, social, and environmental debates concerning legitimacy, technical capacity, and potential conflicts of interest in resource management.

This study employs a normative juridical approach to analyze the legal framework governing the issuance of Mining Business Permits (IUP) in Indonesia. The research adopts a descriptive-analytical method, which not only outlines the licensing procedures but also evaluates their implementation based on existing regulations. Data collection is conducted through library research, while data analysis utilizes a qualitative approach, incorporating data reduction and presentation techniques.

The findings related to the urgency and considerations of the government in granting IUP to religious social organizations indicate that the issuance of IUP, as stipulated in Article 83A of Government Regulation Number 25 of 2024, represents a strategic effort by the government to integrate religious social groups into the national economic framework, particularly in the mining sector. Meanwhile, research findings concerning good governance reveal that the application of transparency, accountability, and public participation is crucial to ensuring the sustainability and effectiveness of this policy. Strong oversight and regulatory mechanisms are necessary to guarantee a fair licensing process, prevent abuse of authority, uphold environmental sustainability, and promote the well-being of local communities, ultimately ensuring that the policy contributes positively to national development.

Keywords: *Good Governance, Mining Business Permit, Religious Community*